

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KLATEN

EFFECTIVENESS OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN KLATEN REGENCY

Oleh: Nur Vita Adin Niyah, Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Yogyakarta,
(vitaadin@yahoo.co.id)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten serta faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, menurut kelima indikator efektivitas kebijakan, yaitu waktu pencapaian, tingkat pengaruh yang diinginkan, perubahan perilaku masyarakat, pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek, tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya dapat dikatakan belum efektif. Kebijakan tersebut belum mampu mencapai tujuan yg ada. Hal itu karena kebijakan yang ada, belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai sampah yang ada di Kabupaten Klaten. Hambatan-hambatan dalam mencapai efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten, yaitu : 1) Sosialisasi yang belum intensif tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten 2) Masyarakat yang pasif terhadap kegiatan pengelolaan sampah secara mandiri 3) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai.

Kata kunci : Efektivitas Kebijakan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

This study aims to investigate the effectiveness of waste management policy in Klaten Regency and the factors which are impeded the effectiveness of waste management policy in Klaten Regency. The result of the research shows that based on five indicator of policies effectiveness are achievement time, the level of desired effect, behavior of citizen change, the lessons learned from the project implementation, the level of citizen's consciousness on ability to self, the effectiveness of waste management policy in Klaten Regency is not effective enough. It is caused by the policy is not yet can solve the problems concern with waste in Klaten Regency. The obstacles in reaching the effectiveness of waste management policy in Klaten Regency are: 1) the socialisation on waste management policy in Klaten Regency are not yet intensive 2)The citizen are passive on self waste management activities 3) The media and infrastucture of waste managemant are not yet sufficient.

Keywords: Policy Effectiveness, Waste Management

PENDAHULUAN

Sampah menjadi masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Kabupaten Klaten adalah salah satu daerah yang juga tidak lepas dari permasalahan sampah. Kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten berdampak pada volume sampah yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan sampah di Kabupaten Klaten disebabkan karena kurangnya lahan untuk dijadikan TPA sampah. Masalah lainnya yaitu sistem pengelolaan sampah TPA di Kabupaten Klaten yang masih menggunakan sistem *open dumping*. Hal ini mengakibatkan tumpukan sampah terlihat di beberapa tempat di Kabupaten Klaten dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Klaten tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Klaten menetapkan sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Kegiatan pengurangan sampah pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dengan pembuatan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) secara kelompok dengan prinsip 3R baru terdapat di 3 desa yaitu desa Ngudi Rapi desa Gergunung, desa Gatak kecamatan Delanggu, dan desa Gayamprit kecamatan Klaten Selatan. Padahal seharusnya tiap desa memiliki 1 TPST tersebut. Masalah pendanaan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis 3R menjadi kendala pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan kegiatan secara menyeluruh di pemukiman. Sedangkan, dalam kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Kegiatan penanganan sampah di Kabupaten Klaten belum maksimal dilakukan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber

Daya Mineral (DPU-ESDM) 2015 tercatat 8% (persen) sampah yang tidak terangkut setiap harinya.

Sarana dan prasarana sampah yang ada di Kabupaten Klaten juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Kapasitas sarana dan prasarana persampahan belum sebanding dengan luas daerah pelayanan sampah. Sehingga dalam kegiatan pengangkutan sampah menjadi kurang maksimal dan masih terdapat sampah yang tidak terangkut. Berdasarkan permasalahan diatas, guna mengukur Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten penulis menggunakan indikator keberhasilan efektivitas kebijakan menurut Bryant dan White (1994: 65) yaitu waktu pencapaian, tingkat pengaruh yang diinginkan, perubahan perilaku masyarakat, pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek, tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud memperoleh gambaran mengenai Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) Kabupaten Klaten dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Klaten. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2016 sampai 27 Juli 2016.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya dari obyek penelitian sehingga data yang dihasilkan akurat. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Widodo Kepala Seksi Kebersihan Pengelolaan Sampah dan Limbah DPU-ESDM, Bapak Muhammad Ali Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan BL, Ibu Sulis pegawai Dinas

Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, Bapak Agus Kepala Desa Karangasem, Jomboran, Klaten, Ibu Poniye masyarakat sekitar TPA Jomboran, Pak Parman masyarakat sekitar TPA Jomboran..

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dipilih yaitu wawancara tidak terstruktur, hal ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian

Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data (Iskandar, 2008: 230).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang memiliki langkah-langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten

Peningkatan jumlah sampah yang ada di Kabupaten Klaten mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah mandiri berwawasan lingkungan yang berbasis 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan.

Melihat hal tersebut pemerintah Kabupaten Klaten membuat sebuah pedoman untuk

mengatasi permasalahan sampah. Pemerintah Kabupaten Klaten mengambil sikap dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dilakukan oleh semua instansi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Waktu pencapaian

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten muncul karena permasalahan sampah yang semakin kompleks. TPA yang ada di Kabupaten Klaten sudah *overload* dan terancam ditutup. Sehingga tumpukan sampah terlihat di TPA. Kondisi tumpukan sampah yang menggunung berdampak pada munculnya penyakit dan pencemaran lingkungan. Sejak saat itu pemerintah Kabupaten Klaten

membuat Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang diimplementasikan hingga saat ini.

Kebijakan

pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah merupakan kebijakan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dengan pengelolaan sampah yang baik akan dapat mengurangi sampah dan pencemaran lingkungan.

Sampai saat ini, empat tahun implementasi Perda Nomor 13 tahun 2012 belum mampu mencapai

seluruh tujuan yang ada dari kebijakan. Implementasi kebijakan yang sudah berjalan empat tahun ini memang belum dapat mencapai semua tujuan yang diharapkan. Banyak peraturan dan program kebijakan yang belum dapat dilaksanakan.

Tingkat pengaruh yang diinginkan

Tingkat pengaruh terkait sejauh mana pengaruh yang diberikan oleh kebijakan ini terhadap sasaran dari kebijakan itu sendiri, dalam hal ini adalah pengelolaan sampah. Adanya kebijakan pengelolaan sampah ini harapannya mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada. Kebijakan ini belum mampu memberikan pengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten agar menjadikan pengelolaan sampah yang benar dan terarah. Dalam kegiatan pengelolaan sampah

pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah mandiri dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yaitu pengurangan sampah dimulai dari sumbernya dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi konsep yang benar-benar akan mengatasi masalah sampah. Kegiatan ini juga dimaksudkan dapat mengurangi volume sampah yang akan diangkut di TPA sampah.

Pelaksanaan kegiatan 3R ini dilakukan dengan pembangunan TPST (Tempat Pengelolaan Terpadu) secara kelompok. Namun, saat ini baru 3 desa yang memiliki TPST tersebut, padahal seharusnya setiap desa memiliki 1TPST. Kebijakan pengelolaan sampah ini belum dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan

pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis 3R, seperti masalah pendanaan untuk pembangun TPST di setiap desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan itu sendiri.

Perubahan perilaku masyarakat

Perubahan perilaku masyarakat merupakan perubahan perilaku masyarakat karena adanya kebijakan, dalam hal ini kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Dalam Perda Nomor 13 tahun 2012 pasal 13 adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Di dalam Perda No.13 tahun 2012 pasal 14 ayat (1) telah dituliskan: Kegiatan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan

kembali, dan pendauran ulang. Upaya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan menerapkan kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), kegiatan mengurangi sampah ini dimulai dari sumbernya yang merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu *pada end of pipe system*, dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat didaur ulang. Pengurangan sampah tersebut dapat menghemat lahan TPA juga dapat mengurangi jumlah angkutan sampah dan menghasilkan kualitas bahan daur ulang

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum dapat merubah perilaku

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Klaten. Masyarakat banyak yang belum berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.

Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek

Pelaksana dari kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH). Selama implementasi kebijakan ini, kedua implementor tersebut pasti memperoleh sebuah pelajaran. Pelajaran yang diperoleh oleh implementor tentunya akan membuat pelaksanaan kebijakan ini semakin baik. Salah satu pelajaran yang diperoleh implementor adalah belum berjalannya kegiatan pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam

kegiatan pengelolaan sampah. Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang isi kebijakan pengelolaan sampah tersebut sangat penting, agar masyarakat semakin paham dan turut berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Kemudian, para implementor perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat supaya dapat memantau perkembangan kegiatan pengelolaan sampah.

Para implementor juga perlu mengkaji ulang masalah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang kurang memadai. Hal ini beakibat masih ada sampah yang tidak terangkut setiap harinya. Sehingga sampah yang tidak terangkut menumpuk di beberapa tempat di Kabupaten Klaten dan berdampak pada pencemaran lingkungan. Hal itu semua perlu dilakukan oleh para implementor karena

sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Diharapkan pelajaran yang didapat dapat memberikan solusi bagi permasalahan sampah di Kabupaten Klaten.

Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya

Setiap kebijakan pada dasarnya mementingkan kepentingan masyarakat. Pada kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten ini kepada masyarakat lah kebijakan ini berpihak. Implementasi kebijakan ini sangat membutuhkan keterlibatan masyarakat didalamnya. Sehingga dapat disimpulkan sejauh mana kesadaran masyarakat dalam kebijakan ini.

Jika masyarakat yang ada disini diibaratkan sebagai implementor kebijakan itu sendiri, maka dapat dilihat bahwa

tingkat kesadaran dari para implementor akan kebijakan ini sangat kurang. Kinerja instansi yang berperan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ada kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini seperti belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Klaten

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten masih belum efektif. Hal ini disebabkan yang pertama sosialisasi yang belum intensif mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Kedua, Masyarakat yang pasif terhadap kegiatan pengelolaan sampah. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dari

pemerintah, masyarakat terkesan cenderung mengabaikan kegiatan kebijakan tersebut. Ketiga, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya peraturan dan program dari kebijakan ini yang belum dapat di laksanakan dengan optimal seperti kegiatan 3R, sehingga belum mampu mencapai tujuan yang ada. Kebijakan yang ada juga belum bisa memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai sampah. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten masih belum efektif.

Saran

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberi saran-saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten.
- b. Kegiatan pengelolaan sampah mandiri berbasis 3R perlu digalakkan baik secara individu dan kelompok, agar masyarakat bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan.
- c. Pembuatan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dengan prinsip 3R di setiap desa di Kabupaten Klaten.
- d. Edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah seperti membuat pupuk kompos dari sampah , pembuatan biogas organik dan pembuatan briket sampah organik.
- e. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana persampahan sesuai sasaran pelayanan, seperti penambahan sarana dan

prasarana persampahan sesuai kebutuhan.

- f. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah di TPA kearah *Sanitary Land Fill*, agar sampah yang ada di TPA dapat dikelola dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Utomo dan Sulastoro. 1999. BPK. Rekayasa Penyehatan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Iskandar.2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Moleong, J. Lexy .. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Said Zainal Abidin. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- Samodra Wibawa, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Website :

<http://www.antara.net.id/index.php/2015/03/03/indonesia-perlu-kerja-keras-tangani-sampah/id/> Diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 12.10 WIB